



Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen Vol 2, (2), 2018, 141-152

JURNAL INSPIRASI BISNIS & MANAJEMEN

Published every June and December e-ISSN: 2579-9401, p-ISSN: 2579-9312
Available online at <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>



Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia

Chaerani Nisa, Dewi Trirahayu, Murthada Sinuraya
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Abstract. *This research aimed to see financial inclusion in the ten largest banks in Indonesia in 2017. To measure the index of financial inclusion we use an index that was proposed by Sarma (2010). Research methodology that is used in this research is descriptive quantitative. As a result, all those ten banks are in a medium category. Their index is ranging from 0,333 as the lowest value to 0,487 as the highest value. It also shows that in some cases, banks with higher asset also have better index score Implication from these finding is commercial banks must be more active in promoting financial inclusive so Indonesia's financial inclusive score is increasing.*

Keywords: Banking; Index of Financial Inclusion, Financial Inclusion.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan keuangan inklusi pada sepuluh bank dengan aset terbesar di Indonesia. Untuk pengukuran indeks keuangan inklusif, penelitian ini menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Sarma (2010). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kesepuluh bank berada pada kategori medium dengan nilai berkisar antara 0,333 hingga 0,487. Hasil lainnya juga menunjukkan, pada beberapa kasus bank dengan aset besar memiliki indeks keuangan inklusif yang lebih baik. Implikasi dari temuan tersebut adalah bank umum di Indonesia harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan aktivitas keuangan inklusif supaya program keuangan inklusif di Indonesia meningkat.*

Katakunci: Perbankan; Indeks Keuangan Inklusif; Keuangan Inklusif.

Cronicle of Article :Received (26-09-2018); Revised (03-12-2018, 14-12-2018); and Published (31-12-2018).

©2018 Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Chaerani Nisa, Dewi Trirahayu, dan Murthada Sinuraya adalah dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640. *Corresponding Author* : chaerani.nisa@univpancasila.ac.id

How to cite this article: Nisa, C., Trirahayu, D., & Sinuraya, M. (2018). Implementasi Metode Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif Pada Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*. 2(2), 141-152.

Retrieved from : <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jibm>

PENDAHULUAN

Kemudahan dalam mengakses fasilitas keuangan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya akses pada fasilitas keuangan seringkali menyebabkan pemerataan pendapatan tidak terjadi dan juga pertumbuhan ekonomi yang lambat (Beck et al., 2009). Keberadaan institusi keuangan adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Ketika institusi keuangan dapat beroperasi dengan baik maka institusi keuangan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku untuk mendapatkan pengembalian yang sesuai dengan investasi yang mereka tanamkan sekaligus memberikan kesempatan untuk sektor-sektor ekonomi untuk berkembang secara maksimal dan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya jika tidak beroperasi dengan baik, maka akan menyebabkan ketimpangan pendapatan terus terjadi di satu sisi, di sisi lain dapat menyebabkan krisis keuangan yang luas.

Hasil penelitian tersebut ditegaskan oleh Park & Mercado (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di 37 negara berkembang di Asia, keuangan inklusif secara signifikan mengurangi kemiskinan dan terjadinya ketimpangan pendapatan. Di sisi lain pendapatan per kapita, penerapan hukum dan karakteristik demografis mempengaruhi terjadinya keuangan inklusif di suatu negara. Temuannya juga menunjukkan provisi bagi golongan masyarakat yang masuk pada usia muda dan tua wajib diberikan dan hukum harus ditegakkan dengan konsisten diantaranya terkait aturan dalam kontrak keuangan dan pengawasan lembaga keuangan.

Tidak hanya berpengaruh positif pada masyarakat secara keseluruhan, keuangan inklusif juga berpengaruh positif pada stabilitas dan tingkat kesehatan perbankan. Ahamed & Mallick (2017) dalam penelitiannya menyebutkan semakin tinggi tingkat keuangan inklusif maka tingkat

stabilitas bank juga semakin membaik. Hubungan positif ini dapat terjadi karena keuangan inklusif menyebabkan komposisi pendanaan terbagi lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian kelompok masyarakat saja. Kondisi ini dapat terjadi karena keuangan inklusif menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam pembukaan rekening pada lembaga keuangan. Sebagai tambahan, dampak positif tersebut dapat lebih dirasakan manfaatnya pada negara dengan kualitas institusi yang cukup baik. Hasil tersebut cenderung *robust* atau konstan pada berbagai situasi. Baik itu pada saat dilakukan analisis pada variabel instrument, adanya *controlling* pada bank *fixed effects*, dan penggunaan pengukuran alternative pada indikator keuangan inklusif. Adanya kondisi tersebut mengharuskan pembuat kebijakan untuk tidak hanya menggunakan keuangan inklusif sebagai target tujuan pembangunan tetapi juga sebagai tujuan individu dari tiap bank karena keuangan inklusif dapat secara efektif meningkatkan stabilitas bank.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dienillah dan Anggraeni (2016) pada negara-negara di kawasan Asia menunjukkan adanya korelasi negatif antara keuangan inklusif dan stabilitas keuangan perbankan dimana dalam hal ini stabilitas keuangan perbankan diukur dengan menggunakan *z score*. Semakin tinggi nilai *z score* semakin rendah risiko stabilitas yang dihadapi oleh perbankan. Indikator lain yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan adalah stabilitas keuangan pada periode sebelumnya, aliran modal selain *Foreign Direct Investment* (FDI), rasio aset lancar terhadap simpanan dan pembiayaan jangka pendek, dan tingkat GDP per kapita.

Namun demikian, Demircuc-Kunt et al (2018) menemukan sebanyak 1,7 miliar penduduk dunia usia dewasa belum memiliki rekening di bank ataupun lembaga keuangan, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam keuangan inklusif. Hampir 50% dari jumlah tersebut berada di tujuh negara berkembang. Tercatat hingga tahun 2017, sebanyak kurang lebih 95 juta penduduk Indonesia usia dewasa atau lebih

dari 50% komposisi penduduk dewasa di Indonesia, belum memiliki rekening di lembaga keuangan. Posisi ini berada di urutan ketiga di bawah China, India (190 juta penduduk), dan Pakistan (100 juta penduduk). Beberapa kondisi yang menyebabkan rendahnya kepemilikan rekening diantaranya adalah jarak yang cukup jauh bagi masyarakat untuk dapat mengakses lembaga keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cámara dan Tuesta (2014) pada 82 negara di dunia, Indonesia berada pada posisi 62 untuk pengukuran penggunaan pada keuangan inklusif. Sedangkan terkait kemudahan akses, Indonesia berada pada posisi 61 dan rendahnya hambatan pada keuangan Inklusif Indonesia berada pada posisi 71.

Kedua temuan tersebut menunjukkan masih rendahnya implementasi keuangan inklusif di Indonesia. Terlepas dari dampak signifikan keuangan inklusif pada kondisi makro ekonomi suatu negara, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Kondisi ini dapat terjadi karena dapat dilihat dari dua hal yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Sisi penawaran melibatkan pihak lembaga keuangan dan regulator dalam menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati layanan keuangan. Sedangkan sisi permintaan diantaranya didapatkan dari keinginan atau ketidakeinginan masyarakat dalam menikmati layanan perbankan. Keinginan untuk mendapatkan layanan keuangan diantaranya ditentukan oleh jarak ke lembaga keuangan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat (Beck et al., 2009).

Regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mendorong perbankan untuk aktif dalam program keuangan inklusif. Melalui program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), mereka memberikan izin bagi perbankan untuk memberikan layanan perbankan tanpa membuka kantor cabang, namun dengan menggunakan agen Laku Pandai. Tercatat hingga akhir tahun 2017 sebanyak 740 ribu

agen Laku Pandai dari 25 Bank Umum Konvensional dan 2 Bank Umum Syariah, telah terdaftar sebagai agennya. Namun demikian kondisi ini belum meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam keuangan inklusif.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan keuangan inklusif sudah dilakukan oleh suatu negara adalah melalui pengukuran indeks keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif dihitung dengan menggunakan data-data keuangan. Beberapa data yang seringkali digunakan adalah jumlah rekening. Sedangkan data lain yang juga digunakan adalah jumlah cabang dari bank, jumlah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan jumlah kredit serta simpanan. Indeks keuangan inklusif pada penelitian ini diaplikasikan pada sepuluh bank dengan predikat aset terbesar di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua permasalahan utama pada penelitian ini. Permasalahan pertama adalah berapa nilai indeks keuangan inklusif pada bank-bank di Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, regulator telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mempromosikan keuangan inklusif. Namun demikian, menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, langkah-langkah tersebut belumlah cukup. Mengacu pada kondisi tersebut, menjadi penting untuk mengetahui nilai dari keuangan inklusif pada masing-masing bank tersebut. Selanjutnya, permasalahan kedua yang akan dijawab adalah bank mana yang memiliki nilai keuangan inklusif terbesar? Dengan mengetahui bank yang memiliki indeks keuangan tertinggi, akan memudahkan bagi bank bank lain untuk menjadikannya sebagai acuan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dengan mengetahui indeks keuangan inklusif secara komprehensif, dapat diketahui pada dimensi manakah terdapat kelemahan. Dengan mengetahui kelemahan tersebut akan mempermudah industry perbankan dalam mencari solusinya. Tujuan kedua adalah dengan adanya peringkat indeks keuangan

inklusi berdasarkan lembaga keuangan, dapat memacu bank lain untuk meningkatkan jangkauan layanan keuangannya pada masyarakat.

Ada dua kontribusi pada penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan memberikan pandangan terkait dengan indeks keuangan inklusif dengan melakukan pengukuran pada spesifik masing-masing bank. Karena bank dengan nilai tertinggi berarti bank tersebut memiliki kinerja social yang lebih baik. Kontribusi kedua, masih belum banyak penelitian terkait indeks keuangan inklusif di Indonesia, dengan demikian penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran terkait dengan topik keuangan inklusif.

TINJAUAN LITERATUR

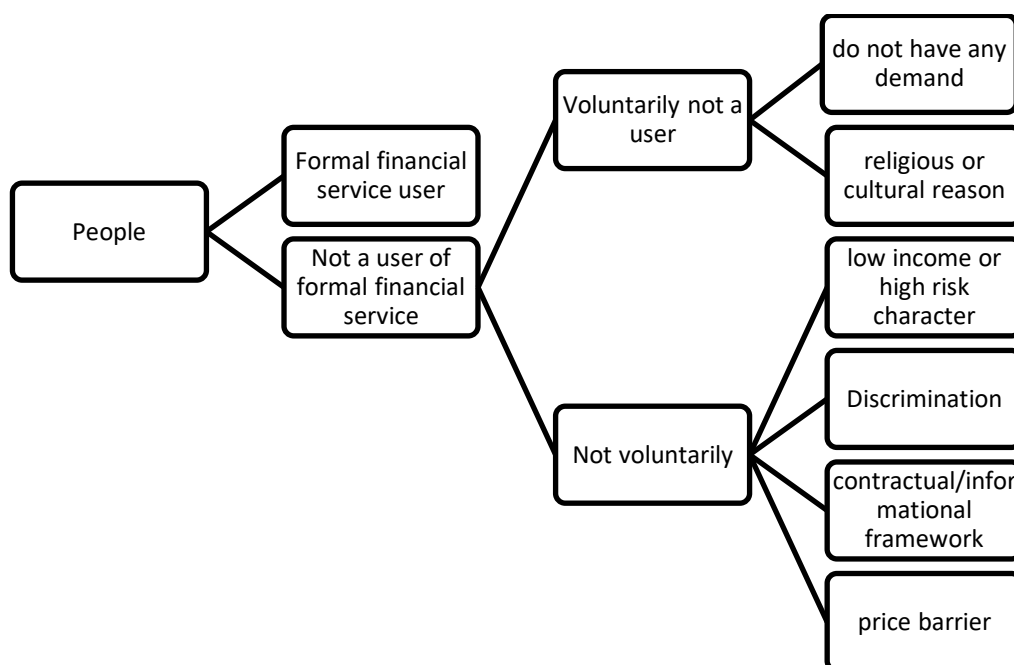
Chauvet & Jacolin (2017) dalam penelitiannya menunjukkan ada tiga aliran utama dalam teori mengenai keuangan inklusif dan kinerja perusahaan. Aliran pertama adalah yang menganalisa hubungan antara *financial deepening* dan pertumbuhan ekonomi. Aliran kedua terkait dengan bagaimana keuangan inklusif mempengaruhi output dalam perekonomian. Aliran yang terakhir adalah bagaimana kompetisi di sektor perbankan mempengaruhi profitabilitas perbankan. Pada kesemua aliran

tersebut ditemukan benang merah adanya hubungan positif antara keuangan inklusif dan kinerja bank maupun perusahaan.

Keuangan Inklusif

Bank Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk meniadakan seluruh hambatan, baik hambatan yang terkait dengan harga maupun hambatan non harga, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan jasa keuangan yang ke depannya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Sedangkan Bank Dunia melalui Demircuc-Kunt et al. (2018) menyebutkan bahwa keuangan inklusif adalah akses dan penggunaan layanan keuangan formal. Sarma (2010) dalam tulisannya mendefinisikan keuangan inklusif sebagai suatu proses yang mendukung kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal bagi seluruh anggota masyarakat dalam perekonomian.

Dalam kaitannya dengan konsep keuangan inklusif, dikenal adanya perbedaan antara akses kepada dan penggunaan terhadap layanan keuangan (Beck et al., 2009)



Sumber : (Beck et al., 2009)

Gambar 1. Perbedaan antara Adanya Akses dan Pengguna Layanan Keuangan

Dalam kasus keuangan inklusif, yang menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah kelompok masyarakat yang termasuk pada kategori tidak menggunakan layanan keuangan secara tidak sukarela. Untuk kelompok masyarakat yang termasuk dalam keempat kategori tersebut diperlukan kebijakan yang berbeda.

Penelitian mengenai keuangan inklusif sudah banyak dilakukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Dienillah & Anggraeni (2016) melihat dampak dari keuangan inklusif terhadap stabilitas keuangan pada tujuh negara di Asia. Hasil penelitiannya menyimpulkan keuangan inklusif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank. Dimana artinya untuk meningkatkan stabilitas perbankan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan formal. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Dienillah & Anggraeni (2017) membagi negara-negara berdasarkan kategori pendapatan dari masing-masing negara tersebut. Hasilnya menunjukkan keuangan inklusif memiliki dampak positif dan

signifikan hanya pada negara-negara yang masuk pada kategori pendapatan tinggi.

Sedangkan pada wilayah lain, yaitu negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North African*), Neaime & Gaysset (2018) menemukan keuangan inklusif yang dalam hal ini dihubungkan dengan kemudahan mendapatkan akses keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya risiko stabilitas keuangan yang artinya pemerintah pada negara-negara MENA menghadapi *trade off* antara mengutamakan inovasi pada layanan keuangan dan menggalakkan keuangan inklusif ataupun membuat kebijakan yang mendukung terciptanya stabilitas pada sektor keuangan. Sedangkan dari sisi makro ekonomi, keuangan inklusif dapat menyebabkan menurunnya ketimpangan pendapatan namun demikian populasi dan inflasi menyebabkan nilai dari ketimpangan pendapatan kembali mengalami peningkatan. Sedangkan pada kemiskinan, keuangan inklusif tidak berdampak apapun.

Kabakova & Plaksenkov (2018) melihat faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhi keuangan inklusif dilihat dari

sudut pandang ekosistem. Hasil temuannya menunjukkan tiga konfigurasi. Ketiadaan pembangunan ekonomi maka keuangan inklusif akan dipengaruhi oleh tingginya social demografis dan faktor-faktor politik. Ketiadaan pembangunan politik maka keuangan inklusif akan ditentukan oleh faktor social, teknologi dan ekonomi. Sedangkan ketiadaan faktor pembangunan sosial dan teknologi akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Selain itu penelitian juga melihat faktor apa yang menentukan dalam kaitannya keuangan eksklusif. Hasilnya ditemukan beberapa konfigurasi yang menyebabkan terjadi eksklusivitas keuangan di suatu negara.

Penentu kesuksesan keuangan inklusif di banyak negara adalah kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung program tersebut. Suatu diskusi dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan keuangan inklusif di berbagai negara dan apa yang harus dilakukan oleh berbagai negara di kedepannya untuk mendukung keuangan inklusif yang lebih baik lagi (Arun & Kamath, 2015).

Tidak hanya dari sisi makro, beberapa peneliti juga melakukan kajian keuangan inklusif dari sisi mikro atau masing-masing institusi keuangan yang ada. Chauvet & Jacolin (2017) meneliti dampak keuangan inklusif dan konsentrasi bank pada kinerja perusahaan di negara berkembang. Dengan menggunakan data perusahaan dari sample sejumlah 55.596 perusahaan di 79 negara, ditemukan bahwa keuangan inklusif, contohnya distribusi layanan keuangan lintas perusahaan, berdampak positif terhadap pertumbuhan perusahaan. Dampak positif ini diperkuat ketika tingkat konsentrasi bank tidak tinggi, proxy bagi kompetisi yang lebih tinggi di antara bank-bank. Temuan lainnya juga menunjukkan, bank yang kompetitif hanya diinginkan jika keuangan inklusif berjalan dengan baik. Sedangkan, tingkat kompetisi yang tinggi pada bank hanya diinginkan pada perusahaan asing ataupun perusahaan milik negara ketika keuangan inklusif berada pada tingkat yang rendah.

Di sisi lain Ahamed (2016) melihat dampak dari keuangan inklusif terhadap penghindaran pajak. Semakin berkembangnya sektor keuangan akan menyebabkan semakin rendahnya keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dampak ini bisa menjadi semakin kuat bagi negara dengan penerapan hukum yang kuat dan komposisi ekonomi informal yang rendah. Karenanya penelitian Ahamed (2016) menyarankan peningkatan keuangan inklusif supaya penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Selanjutnya Ahamed & Mallick (2017) melihat bagaimana dampak dari keuangan inklusif terhadap stabilitas bank. Apakah baik atau buruk. Sebagai sample penelitiannya dipilih 2.635 bank di 86 negara untuk periode 2004 hingga 2012. Dari penelitiannya ditemukan tingkatan keuangan inklusif yang lebih tinggi berdampak positif terhadap stabilitas yang lebih tinggi juga. Hubungan positif tersebut pada umumnya terjadi pada bank yang memiliki *share* nasabah deposit lebih tinggi, *marginal cost* lebih rendah dan beroperasi di negara dengan kualitas institusi yang lebih kuat. Hasil tersebut *robust* walaupun sudah menggunakan beberapa analisis variabel instrumental, mengontrol *fixed bank effects*, menggunakan pengukuran keuangan inklusif yang berbeda. Hasil penelitian Ahamed & Mallick (2017) menggarisbawahi bahwa keuangan inklusif tidak hanya semata tujuan pembangunan suatu negara tapi kondisi yang dibutuhkan oleh suatu bank.

Indeks Keuangan Inklusif

Berbagai indikator digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara melaksanakan konsep keuangan inklusif. Indikator tersebut diantaranya jumlah rekening (per 1000 penduduk dewasa), jumlah ATM (per satu juta penduduk), jumlah pinjaman bank dan jumlah simpanan di bank. Selain indikator tersebut, indikator capaian sektor perbankan juga seringkali digunakan. Beberapa indikator yang masuk dalam kategori ini adalah penetrasi cabang secara geografis, pinjaman dan simpanan per

kapita, rasio pinjaman per pendapatan, rasio simpanan per pendapatan dan rasio-rasio lainnya. Masing-masing rasio ini penting untuk mengukur keuangan inklusif. Namun demikian, penggunaan hanya salah satu indikator pengukuran dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Karena itu, indeks keuangan inklusif merupakan pengukuran yang menggunakan seluruh indikator untuk mengukur sejauh mana keuangan inklusif dilaksanakan.

Sarma (2010) membagi indeks keuangan inklusif menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah penetrasi bank. Indikator yang masuk pada dimensi ini adalah jumlah rekening bank per 1000 penduduk usia dewasa. Dimensi kedua adalah ketersediaan layanan. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah jumlah cabang bank (per 1000 orang) dan jumlah ATM per 1000 orang. Dimensi ketiga adalah penggunaan. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah jumlah pinjaman dan jumlah simpanan dibagi dengan GDP.

Sedangkan Cámara dan Tuesta (2014) mengukur keuangan inklusif dengan membaginya menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama adalah penggunaan. Indikator yang termasuk dalam kategori ini adalah memiliki satu produk keuangan, memiliki tabungan, dan memiliki pinjaman pada lembaga keuangan formal. Dimensi kedua adalah hambatan. Dimensi ini melihat hambatan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga tidak dapat mengakses layanan keuangan. Karena hubungannya yang negative, semakin tinggi nilai dari dimensi maka semakin rendah indeks keuangan inklusif. Indikator yang masuk pada kategori ini adalah jarak, kurangnya dokumen yang diperlukan, kemampuan dan kurangnya kepercayaan pada sistem lembaga keuangan formal. Dimensi ketiga adalah akses. Indikator yang termasuk pada dimensi ini adalah jumlah ATM per 1.000.000 penduduk, cabang bank per 1000 penduduk dewasa, jumlah ATM per 1.000 km, dan cabang bank per 1.000 km.

Program Laku Pandai

Laku Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam

Rangka Keuangan Inklusif. Laku Pandai adalah program dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) serta didukung oleh sarana digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Hingga bulan Desember 2017, Bank yang terlibat sebanyak 27 bank. Dari jumlah bank tersebut, menghasilkan 740 ribu agen dan 13 juta nasabah yang tersebar di 34 provinsi dan 512 kota/kabupaten.

Hipotesis

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti mengajukan dua hipotesis. Karena menurut Cámara & Tuesta (2014) dan Demirguc-Kunt et al. (2018) Indonesia masih rendah tingkat implementasi keuangan inklusif yang terjadi, maka hipotesis pertama adalah indeks keuangan inklusif pada kesepuluh bank tersebut ada pada kategori medium atau rendah. Kondisi ini mengantarkan pada hipotesis kedua yaitu semakin besar aset suatu bank maka indeks keuangan inklusif akan semakin baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, data sekunder dikumpulkan, dilakukan analisa untuk kemudian berdasarkan data tersebut peneliti membuat interpretasi atas hasil yang diperoleh. Berdasarkan metode tersebut maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank yang ada di Indonesia. Sebagai sample maka dipilih sepuluh bank dengan aset terbesar di Indonesia. Kesepuluh bank tersebut adalah BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIMB Niaga, Bank Panin, OCBC NISP, Maybank Indonesia and Bank Danamon. Total aset dari kesepuluh bank tersebut adalah Rp 4.647 Triliun atau 65% dari total aset seluruh bank umum di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pengaruh kesepuluh bank terhadap industri perbankan di Indonesia cukup besar.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dari berbagai sumber bereputasi. Sumber pertama adalah situs bank bersangkutan dan juga dari laporan tahunan yang dipublikasi. Sumber kedua berasal dari situs regulator diantaranya adalah situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs Bank Indonesia (BI). Peneliti menggunakan data tahun 2017 karena periode tersebut merupakan periode terkini dari saat dilakukannya penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Untuk pengukuran indeks keuangan inklusif, penelitian ini menggunakan pengukuran Sarma (2010). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$IKI = 1 - \sqrt{\frac{(1-p_i)^2 + (0,5-a_i)^2 + (0,5-u_i)^2}{1,5}} \quad (1)$$

Where:

- IKI* = Indeks Keuangan Inklusif
p = penetrasi perbankan
a = kemudahan penggunaan
u = penggunaan layanan keuangan

Definisi Operasional Variabel

Penetrasi Perbankan. Suatu sistem keuangan yang inklusif haruslah melibatkan orang sebanyak mungkin. Semakin banyak pihak yang memiliki rekening di bank menunjukkan populasi *banked people* di negara tersebut semakin tinggi. Alat ukur yang bisa digunakan adalah berapa orang yang memiliki rekening bank di suatu negara. Namun demikian, dalam penelitian ini *proxy* tersebut digantikan dengan jumlah rekening yang ada di bank tersebut dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun.

Kemudahan Penggunaan. Pada sistem keuangan inklusif, layanan perbankan harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Indikator ketersediaan adalah outlet perbankan (kantor, cabang, karyawan bank dll). Karenanya, ketersediaan layanan dapat diindikasikan dengan jumlah kantor bank (per 1000 orang) dan/atau dengan

jumlah ATM per 1000 orang. Jumlah pegawai bank untuk setiap pelanggan juga dapat digunakan sebagai indikator lainnya terhadap ketersediaan layanan perbankan. Lebih jauh, dengan semakin majunya perkembangan dunia digital di sektor perbankan, data terhadap ketersediaan layanan perbankan berbasis elektronik atau internet sebaiknya juga dimasukkan pada dimensi ini. Pada penelitian digunakan data berupa jumlah ATM dan kantor cabang pada masing-masing bank. Untuk kantor cabang dikenakan bobot sebesar 2/3 sedangkan untuk ATM dikenakan bobot sebesar 1/3.

Penggunaan. Dimensi ini didorong oleh gagasan adanya masyarakat *underbanked* dan *marginally banked*. Mereka adalah kelompok masyarakat yang walaupun telah memiliki akses ke perbankan dalam bentuk kepemilikan rekening namun tidak menggunakan akses tersebut secara maksimal. Karena, kepemilikan rekening bank tidaklah cukup. Dibutuhkan juga bahwa layanan perbankan dimanfaatkan dengan maksimal. Dalam memasukkan dimensi penggunaan pada indeks ini, dipertimbangkan dua layanan mendasar dalam sistem perbankan yaitu simpanan dan pinjaman. Mengacu pada hal tersebut, maka sebagai proxy digunakan pengukuran volume pinjaman dan deposito terhadap GDP negara.

Berdasarkan skor IKI, bank dibagi menjadi tiga kategori. Kategori tersebut adalah:

1. $0.5 < IKI \leq 1 \rightarrow$ Tinggi
2. $0.3 < IKI \leq 0.5 \rightarrow$ Menengah
3. $0.0 \leq IKI \leq 0.3 \rightarrow$ Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 memperlihatkan variabel dari kesemua bank. Pada jumlah rekening, BRI berada pada urutan pertama dengan 50 juta rekening. Posisi kedua adalah BNI, sedangkan pada posisi ketiga adalah Bank Mandiri. Kondisi ini menunjukkan BRI, BNI dan Bank Mandiri agresif dalam mendapatkan nasabah baru dalam bentuk

penambahan jumlah rekening. Ketiga bank tersebut juga terdaftar sebagai bank peserta Program Laku Pandai sejak Juni 2015, bersama dengan BCA dan BTPN. Periode ini adalah gelombang pertama dari Program Laku Pandai.

Analisis kedua adalah dimensi kemudahan penggunaan dengan melihat jumlah ATM yang dimiliki dan jumlah jaringan kantor. Pada dimensi ini terlihat BRI mendominasi dengan memiliki jumlah cabang terbesar dan ATM terbanyak. Jumlah ATM yang dimiliki mencapai lebih dari 24 ribu unit pada tahun 2017. Posisi kedua adalah BNI dengan 17.966 ATM di seluruh Indonesia. Sedangkan Bank Mandiri berada pada posisi ketiga dengan 17.766 ATM.

Sementara pada jumlah kantor cabang, BRI juga memiliki jumlah cabang terbesar. Kantor cabang BRI meliputi kantor cabang pembantu, kantor kas, Teras BRI dan

Teras BRI Keliling. Jumlah keseluruhan dari semua cabang tersebut adalah 10.646. Jauh di atas bank yang berada pada posisi kedua dan ketiga. BNI memiliki 2.853 cabang dan Bank Mandiri memiliki 1.904 cabang.

Kondisi ini juga terjadi pada total dana simpanan dan total pinjaman yang disalurkan. BRI berada pada posisi pertama sebagai bank dengan banyaknya jumlah pinjaman yang disalurkan. Sampai dengan 2017, total pinjaman yang disalurkan oleh BRI adalah sebesar Rp 739 Triliun. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri adalah sebesar Rp 687 Triliun dan BCA sebesar Rp 467 Triliun. Untuk dana pihak ketiga yang dikumpulkan, BRI juga berada pada posisi pertama dengan total dana yang dikumpulkan sebesar Rp 841 Triliun. Sedangkan di posisi kedua dan ketiga adalah Bank Mandiri dan BCA dengan Rp 749 Triliun dan Rp 581 Triliun.

Tabel 1. Nilai Variabel

Bank	Jumlah Rekening	Jumlah ATM	Jumlah Kantor Cabang	Jumlah Pinjaman (Rp Milyar)	Jumlah Simpanan (Rp Miliar)	Total Aset (Rp Triliun)
BRI	50.000.000	24.684	10.646	739.337	841.656	1.128
Mandiri	21.900.000	17.766	2.853	678.292	749.584	1.124
BCA	17.048.000	17.658	1.235	467.509	581.115	750
BNI	33.134.414	17.966	1.904	441.314	492.748	709
BTN	15.010.961	1.830	3.728	181.003	177.091	261
CIMB Niaga	6.500.000	4.500	522	181.406	189.317	266
Panin	580.000	967	562	131.954	145.671	164
OCBC NISP	24.305	753	340	104.011	113.082	154
Maybank Ind	2.900.000	1.606	407	113.814	121.292	173
Danamon	15.721	1.396	992	96.969	101.897	178
Rata-rata	14.977.289	11.596	3.185	275.227	311.125	
Min	15.721	753	340	63.760	68.937	
Maks.	50.000.000	24.684	10.646	739.337	841.656	
Std. Dev	14.546.720	8.216	3.347	195.760	229.763	

Sumber: Laporan Tahunan Bank

Pada umumnya, bank dengan aset yang rendah, memiliki nilai rendah juga pada variabel yang diukur. Contohnya, OCBC adalah bank dengan aset terendah. OCBC juga memiliki jumlah cabang dan jumlah ATM terkecil dibandingkan bank lainnya. Kondisi ini menunjukkan skala ekonomis dari perbankan.

Pada jumlah rekening, Bank Danamon menunjukkan jumlah terendah. Pada tahun 2017, jumlah rekening yang terdaftar di Bank Danamon adalah sebanyak 15.271 rekening. Jumlah ini jauh di bawah jumlah rekening BRI. Bank Danamon tercatat sebagai bank partisipan dalam Program Laku Pandai pada bulan September 2016.

Jumlah rata-rata rekening dari kesepuluh bank tersebut adalah 14 juta rekening. Namun demikian, perbedaan antara bank dengan jumlah rekening terbesar dengan bank dengan jumlah rekening terkecil, cukup jauh. Kondisi ini juga dapat dilihat dari tingginya nilai standar deviasi. Jumlah rekening terbesar mayoritas dikuasai oleh empat bank dengan aset terbesar. Empat bank dengan aset terbesar yaitu BCA, BRI, BNI dan Bank Mandiri menguasai 83% jumlah rekening di seluruh industri perbankan di Indonesia.

Sementara pada jumlah ATM tercatat rata-rata jumlah ATM yang dimiliki oleh kesepuluh bank adalah sebanyak 11 ribu ATM. Empat bank terbesar memiliki jumlah ATM jauh lebih besar dari enam bank lainnya. BRI memiliki jumlah ATM terbesar sedangkan OCBC NISP memiliki jumlah ATM paling sedikit dibandingkan bank lainnya. Standar deviasi jumlah ATM adalah sebesar 8.216. Kondisi ini menunjukkan variasi yang cukup besar pada jumlah ATM.

Jumlah ATM menunjukkan seberapa besar komitmen bank dalam mewujudkan *branchless banking*. Karena kehadiran ATM dapat menggantikan adanya kantor cabang.

Rata-rata jumlah ATM adalah sebesar tiga ribu cabang. BRI tercatat sebagai bank dengan jumlah cabang terbanyak sedangkan OCBC NISP memiliki jumlah cabang terkecil. Standar deviasi pada jumlah cabang adalah sebesar 3.347. Kondisi ini juga menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepemilikan pada setiap bank cukup tinggi.

Jumlah rata-rata pinjaman yang disalurkan adalah sebesar Rp 275 Triliun. Bank Danamon memiliki jumlah pinjaman disalurkan paling rendah dengan Rp 96 Triliun. Standar deviasi tercatat sebesar Rp 196 Triliun. Sementara rata-rata jumlah simpanan yang dikumpulkan adalah Rp 311 triliun. Bank Danamon memiliki jumlah dana pihak ketiga paling kecil. Standar deviasi tercatat sebesar Rp 229 triliun.

Tabel 2. Indeks Keuangan Inklusif

Bank	Indeks Keuangan Inklusif	Kategori	Peringkat
BRI	0,487	Medium	1
Mandiri	0,407	Medium	3
BCA	0,391	Medium	4
BNI	0,439	Medium	2
BTN	0,383	Medium	5
CIMB Niaga	0,355	Medium	6
Panin	0,335	Medium	8
OCBC NISP	0,333	Medium	9
Maybank Indonesia	0,343	Medium	7
Danamon	0,333	Medium	10

Sumber : hasil pengolahan data

Tabel 2 memperlihatkan Indeks Keuangan Inklusif pada sepuluh bank. Hasil dari perhitungan menunjukkan BRI memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0,487, diikuti oleh BNI dan Bank Mandiri. Sementara dalam hal kategori, kesepuluh bank berada pada kategori medium. Hal ini terjadi karena nilai indeks berkisar antara 0,333 hingga 0,487. Dimana kisaran nilai tersebut berada pada kelompok medium. Kondisi ini menunjukkan

kesepuluh bank belum mengaplikasi keuangan inklusif secara tepat. Namun demikian, kinerja social mereka secara keseluruhan juga tidak buruk. Bank dengan skor terkecil adalah OCBC NISP dan Danamon.

Pada komponen yang membentuk skor, maka penetrasi perbankan, dalam hal ini jumlah rekening yang dimiliki relatif masih kecil. Karena itu, skor keuangan inklusif juga

tidak besar. Dalam hal ini, perbankan harus lebih giat dalam menarik orang untuk memanfaatkan fasilitas perbankan. Sedangkan pada komponen kedua yaitu kemudahan penggunaan, disadari bahwa bank harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk pembukaan ATM ataupun cabang. Karena itu, pemanfaatan *financial technology* sebaiknya juga diperhitungkan. Sedangkan pada penggunaan layanan keuangan, beberapa kebijakan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan mampu meningkatkan skor ini di kemudian hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Kesepuluh bank berada pada kategori medium. Pada penetrasi perbankan, bank-bank relative belum menjangkau masyarakat banyak. Hal ini terlihat dari nilai penetrasi perbankan yang masih kecil, Kemudian untuk kemudahan penggunaan, jumlah ATM dan cabang relative masih kecil dibandingkan jumlah penduduk. Demikian juga dengan kredit yang disalurkan, relative masih kecil dibandingkan dengan nilai PDB.

Kesimpulan kedua yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bank dengan jumlah aset besar pada umumnya memiliki skor lebih baik daripada bank dengan aset kecil. Walaupun, ada beberapa kondisi dimana hal tersebut tidak terjadi. Diantaranya yang terjadi dengan BCA dan BNI. BCA memiliki jumlah aset lebih besar dari BNI namun skor keuangan inklusif BNI lebih tinggi dari BCA.

Saran

Saran terkait penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Perhitungan hanya mencakup satu tahun, perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah tahun supaya nilai yang dihasilkan lebih objektif. Jumlah bank yang digunakan sebagai sampel juga dapat ditingkatkan. Misalnya menjadi seluruh bank yang ada di Indonesia.

Sedangkan saran terkait hasil penelitian adalah bahwa kebijakan keuangan inklusif harus lebih digalakkan dengan

memberikan insentif yang memotivasi dunia perbankan. Misalnya, insentif berupa kemudahan dalam menyalurkan kredit program jika bank tersebut secara aktif memiliki komitmen dalam menjalankan keuangan inklusif. Selain itu, sejauh mana *financial technology* sudah diterapkan di suatu bank juga sebaiknya dimasukkan dalam perhitungan skor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, M. M. (2016). Does inclusive financial development matter for firms' tax evasion? Evidence from developing countries. *Economics Letters*, 149, 15–19.
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.10.003>
- Ahamed, M. M., & Mallick, S. K. (2017). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.07.027>
- Arun, T., & Kamath, R. (2015). Financial inclusion: Policies and practices. *IIMB Management Review*, 27(4), 267–287.
<https://doi.org/10.1016/j.iimb.2015.09.004>
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Honohan, P. (2009). Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies. *The World Bank Research Observer*, 24(1), 119–145.
<https://doi.org/10.1093/wbro/lkn008>
- Cámara, N., & Tuesta, D. (2014). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional Index. *BBVA Research Working Paper No. 14/26*, (September).
- Chauvet, L., & Jacolin, L. (2017). Financial Inclusion, Bank Concentration, and Firm Performance. *World Development*, 97, 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.018>
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D.,

- Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017 Measuring Financial Inclusion and The Fintech Revolution*. Washington DC: World Bank Group.
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 409–430.
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2017). Impact of Financial Inclusion on Financial Stability Based on Income Group Countries. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 20(4), 1–14.
- Kabakova, O., & Plaksenkov, E. (2018). Analysis of factors affecting financial inclusion : Ecosystem view. *Journal of Business Research*, 89(June 2017), 198–205.
- <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.066>
- Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA : Evidence from poverty. *Finance Research Letters*, 24(September 2017), 230–237.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.09.007>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Laku Pandai Sahabat Masyarakat. Retrieved June 7, 2018, from <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>
- Park, C., & Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion , Poverty , and Income Inequality in Developing Asia. *ADBEconomics Working Paper Series*, (426).
- Sarma, M. (2010). Index of Financial Inclusion. *Economic Analysis*, (98).